

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa dikenal juga dengan administrasi pemerintahan terkecil di Indonesia. Pada umumnya desa mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas dan dihuni oleh beberapa keluarga. Pada tahun 2017 jumlah desa di seluruh Indonesia adalah 82.030 desa, yang tersebar di 34 provinsi, 511 kabupaten/kota dan 7000 lebih kecamatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi tersebut menunjukkan desa sebagai ujung tombak pemerintahan, sehingga diharapkan desa dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya, baik potensi alam maupun dalam bidang administrasinya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa diperlukan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat, baik berupa sumber daya manusia, dana maupun sarana prasarana penunjang lainnya. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat untuk desa adalah dengan adanya kewajiban bagi pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat desa.

Selama tahun 2015-2017 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun dan jumlah ini meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, bahkan pada tahun 2017 jumlah yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun (Mustami, 2017). Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang terus mengalami peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di pedesaan.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menyebutkan bahwa walaupun dana desa mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun desa tertinggal dan sangat tertinggal masih banyak. Lebih lanjut Boediarso menyebutkan bahwa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia mencapai 60% dari total desa yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa pemberian dana desa yang sama jumlahnya untuk setiap desa, belum mampu memberikan hasil yang sama, tergantung

dari pengelolaan dan pemanfaatan serta ketepatan sasaran dari masing-masing desa (Mustami, 2017).

Menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, pengelolaan dana seharusnya berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan dan tipologi desa. Dana desa hanya digunakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana dan pelayanan dasar, sedangkan sarana-sarana lainnya dilakukan bila pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar sudah mencukupi. Dana desa dikelola dengan cara padat karya dan memakai bahan-bahandari desa yang bersangkutan. Hal ini membuat seluruh masyarakat desa dapat merasakan hasil dari dana desa yang bersangkutan (Soleh dkk 2016). Agar tujuan alokasi dana desa tercapai, maka dana desa harus dikelola sesuai prinsip-prinsip keuangan, salah satunya adalah akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang diimbani kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan menginfokan seluruh kegiatan serta aktivitasnya sebagai bentuk tanggungjawab kepada orang yang memberikan kepercayaan, dimana orang tersebut memiliki hak dan kekuasaan untuk memperoleh tanggungjawab. Pihak yang memberikan kepercayaan mempunyai hak untuk mengontrol serta mengawasi proses kegiatan yang dilaksanakan pemegang kekuasaan agar dapat menurunkan tindakan yang tidak terpuji.

Sumpeno (2011) menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan semua aktivitas yang dilakukannya yang terkait dengan pembangunan dan pemerintahan

desa. Astuty dan Fanida (2013) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan, bukan hanya dalam bentuk laporan keuangan namun juga terkait dengan pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas alokasi dana desa maka dapat diartikan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak lain mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa yang bersumber dari dana desa. Hal ini berarti aparatur desa mempunyai peran penting dalam mengelola keuangan desa terutama dana desa dalam melaksanakan pembangunan. Permasalahannya adalah belum semua desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Desa Krembangan ialah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai daya tarik sebagai tempat penelitian yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 karena menurut laporan Inspektorat Kabupaten Kulonprogo ditemukan cukup banyak terjadi pelanggaran dalam alokasi dana desa seperti: (a) Bendahara pengeluaran belum membuat laporan pertanggungjawaban, (b) Register penutupan kas belum dibuat oleh bendahara pengeluaran, (c) Pelaksanaan pengelolaan barang kurang optimal, (d) Penyaluran barang milik daerah belum tertib, (e) pengguna anggaran kurang tepat sasaran (f) Terdapat penggunaan pribadi dana APBDes, (g) Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sering melewati batas waktu yang telah ditentukan, (h) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembanagunan desa, (i) Minimnya informasi yang dierikan kepada masyarakat terkait dengan hasil laporan

pengeluaran kas desa, (j) Minimnya transparansi terkait dengan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan temuan-temuan diatas terhadap pengelolaan keuangan dimana Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu sumber dananya, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari sumber keuangan desa di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo dapat diteliti secara lebih dalam. Kondisi ini dikarenakan kinerja aparat desa dalam melayani masyarakat dapat ditingkatkan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel, sehingga mampu memberdayakan masyarakat desa.

Desa Krembangan, sebagai satu dari beberapa desa di Kabupaten Kulonprogo telah membuat rencana dan melakukan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tentang pedoman pengelolaan dana desa, dimana disebutkan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kulonprogo untuk:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menurut kewenangannya dapat ditingkatkan.
2. Kemampuan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan pembangunan dapat ditingkatkan secara partisipatif menurut potensi yang dimiliki desa.
3. Pendapatan semakin merata, terbukanya lowongan kerja dan kesempatan masyarakat desa dalam meningkatkan usahanya.
4. Dinamika masyarakat dapat dikembangkan

5. Pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dapat digerakkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan dalam memenuhi keperluan desa selaras dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 60 Tahun 2017 yaitu: (1) Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak 30% dari belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa; dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak 70% dari belanja desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan pada tahun 2017 lebih besar daripada tahun 2016. Berikut ini rincian jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Krembangan.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2017

	2016		2017	
	Periode	Jumlah	Periode	Jumlah
Tahap I	Mei	Rp 429.345.600	April	Rp 528.316.800
Tahap II	September	Rp 283.376.700	Agustus	Rp 352.211.200
Jumlah Alokasi Dana Desa		Rp 712.722.300		Rp 880.528.000

Sumber: Pemerintah Desa Krembangan, 2017.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan diterima dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar Rp 528.316.800 dan tahap II sebesar Rp 352.211.200 sehingga total alokasi dana desa yang diterima sebesar Rp 880.528.000. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2016.

Pra penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan berbagai aparat pemerintah desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat ditemukan beberapa temuan tentang akuntabilitas pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan yang berjumlah 70% yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 60 Tahun 2017 tentang perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD), dimana disebutkan Alokasi dana Desa (ADD) yang diperoleh pemerintah desa sebesar 70% digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi belanja fisik dan non fisik sehingga publik dapat merasakan dari pembelanjaan tersebut serta ikut berpartisipasi melaksanakan pemberdayaan dan membangun semua infrastruktur seperti yang sudah dibuat.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan mengenai penggunaan dana paling banyak 70% untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana diketahui Desa Krembangan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar yaitu senilai Rp 880.528.000. Berhasil tidaknya desa dipengaruhi oleh adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dengan warga, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG**

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KREMBANGAN, KECAMATAN PANJATAN, KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi pemerintahan desa Krembangan sebagai masukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.4.2 Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah informasi bagi pemerintah Desa Krembangan dalam membuat kebijakan terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi warga desa tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat ikut serta untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian ini terdapat 5 (Lima) penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian sekarang mengenai persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1	Noor Rizqia Sari (2015)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban telah transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih dibutuhkan adanya pembinaan lebih lanjut karena pengelolaan Alokasi

			Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal sehingga masih membutuhkan pengawasan dalam setiap perencanaan yang dikelola.
2	Okta Roslinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan	Tata Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum cukup efektif karena mekanisme sistem perencanaan tidak begitu sesuai dengan apa yang direncanakan, diakibatkan kurang efektifnya fungsi lembaga desa serta kurangnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangun desa.
3	Arfianto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di 10 Desa Kecamatan Umbulsari secara berkala sudah melaksanakan konsep pembangunan yang partisipatif dan menerapkan konsep partisipatif, respondif,

			transparan serta pertanggungjawaban atau akuntabel secara teknis sudah cukup baik.
4	Thomas (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional sesuai dengan perencanaan yang di tetapkan dan melibatkan masyarakat dalam menunjang peningkatan pembangunan
5	Budi Hartono (2015)	Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Program Alokasi Dana Desa	partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal dikarenakan kurang efektifnya Sistem pelaksanaan

Persamaan-persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang tema yaitu tentang persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaannya adalah pada objek, tempat serta fokus penelitian. Kebanyakan penelitian sebelumnya tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari segi perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban, administrasi, kelembagaan, keterlibatan masyarakat, masih belum efektif walaupun sebagian penelitian ada yang sudah efektif akan tetapi masih ada salah satu dari penelitian yang masih belum berjalan dengan baik tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian ini lebih fokus kepada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), baik segi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, maupun keterlibatan masyarakat desa. Selain itu, subjek, objek dan tempat penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini yang menjadi alasan peneliti tertarik meneliti tentang Persepsi Masyarakat Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Persepsi Masyarakat

Secara bahasa, persepsi berasal dari bahasa Latin *perceptio* yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003). Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Menurut Leavitt (Sobur, 2003) persepsi (*perception*) secara sempit ialah bagaimana seorang individu memandang suatu obyek, sedangkan secara luas ialah pengertian yaitu bagaimana seorang individu menafsirkan suatu obyek.

Menurut Mulyana (Sobur, 2003) persepsilah yang menentukan seseorang untuk melihat pesan atau mengabaikannya. Semakin tinggi persamaan persepsi antara dua orang lebih maka akan semakin mudah mereka melakukan komunikasi, dan

dampaknya akan semakin tinggi kecenderungan untuk membentuk suatu kelompok budaya. Hal ini didukung oleh pendapat Suranto Aw (2011) yang menyebutkan bahwa persepsi adalah pokok komunikasi. Persepsi mempunyai fungsi yang penting dalam menjalin komunikasi.

Menurut Sobur (2003) persepsi adalah proses penerimaan, penyeleksian, pengorganisasian, pengartian, pengujian, dan pemberian reaksi kepada stimulan pancaindera. Persepsi merupakan mampu tidaknya otak dalam menafsirkan rangsangan yang diterima.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Pelaku Persepsi

Seseorang yang melihat sesuatu akan berusaha mengartikan menurut penglihatannya, pengartian tersebut dipengaruhi oleh sifat dan watak dari orang tersebut. Persepsi dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yaitu:

a) Sikap

Sikap adalah suatu penilaian perasaan yang berasal dari hubungan antara komponen kognitif, afektif, dan konatif dimana ketiga komponen tersebut saling berhubungan dalam memahami, merasakan dan berperilaku pada objek tertentu. Warna perilaku atau perbuatan dari seseorang dipengaruhi oleh sikap.

b) Motif (kebutuhan)

Motif merupakan stimulus yang merangsang keinginan dan menjadi penggerak keinginan seorang individu. Motif mempengaruhi persepsi.

c) Kepentingan (minat)

Minat merupakan perhatian seseorang terhadap sesuatu hal. Setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, pendapat orang yang satu akan dipersepsikan beda oleh orang lain, walaupun dalam waktu yang sama.

d) Pengalaman masa lalu

Pengalaman diartikan sebagai suatu kondisi yang dirasakan oleh seorang individu, yang mendorongnya untuk membuktikan langsung untuk mendukung pendapatnya. Dengan demikian pengalaman sendiri mempunyai kesan yang lebih kuat daripada pengalaman yang dialami orang lain.

e) Pengharapan

Pengharapan diartikan sebagai suatu rasa agar sesuatu terjadi. Harapan dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup dan kemampuan. Pengharapan bisa mengalihkan persepsi seseorang dalam memandang sesuatu.

2. Target

Persepsi seseorang mengenai target dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu:

a) Hal baru

Hal-hal yang baru pada umumnya lebih menarik untuk dipersepsikan daripada sesuatu yang sudah lama.

b) Latar belakang

Persepsi seseorang mengenai suatu objek juga dipengaruhi oleh latar belakang dari objek tersebut.

c) Kedekatan

Objek yang saling berdekatan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, cenderung akan ditafsirkan sama.

3. Situasi

Situasi dapat yang mempengaruhi persepsi adalah:

a) Waktu

Seseorang yang melihat sesuatu pada waktu bersamaan bisa berpengaruh terhadap perhatiannya.

b) Keadaan lingkungan

Keadaan lingkungan yang baik dapat berpengaruh terhadap persepsi.

c) Keadaan sosial

Persepsi yang berbeda dihasilkan oleh suatu objek dengan situasi sosial yang tidak sama.

b. Sifat-Sifat Persepsi

Persepsi terjadi dalam diri individu yang mempersepsikan, bukan di dalam suatu objek yang selalu memiliki pengetahuan terhadap penampakan. Rakhmad (2004) menyebutkan bahwa untuk membantu memudahkan mengetahui makna dari persepsi, maka dapat kita lihat berbagai macam sifat-sifat persepsi yang meliputi:

1) Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan makna dari seorang, objek atau peristiwa, harus dimiliki basis dalam melakukan interpretasi, yang biasa ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan orang, objek, peristiwa tersebut.

2) Persepsi adalah selektif

Ketika mempersepsikan sesuatu, biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari objek atau tertentu berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.

3) Persepsi adalah penyimpulan

Proses psikologi dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap oleh indra.

4) persepsi bersifat tidak akurat

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu, yang disebabkan oleh pengaruh masa lalu, selektivitas dan penyimpulan.

5) persepsi bersifat evaluative

Persepsi tidak akan bisa objektif dikarenakan dalam suatu proses menginterpretasikan arti berdasarkan suatu pengalaman serta merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi. Sehingga dalam mempersepsikan suatu objek perlu dilihat baik atau buruknya. Adalah sangat langka jika dapat mempersepsikan suatu secara sepenuhnya netral.

c. Indikator Pengukuran Persepsi

Robbin (2003) menyebutkan bahwa indikator persepsi meliputi:

1) Penerimaan

Pada tahap ini, indera berfungsi untuk menangkap stimulan dari luar. Penerimaan menjadi indikasi telah terjadi persepsi.

2) Evaluasi

Stimulus yang diterima oleh indera, lalu dinilai oleh seseorang. Hal ini bersifat subyektif. Seseorang dapat menilai sesuatu sebagai yang indah, dan orang lainnya menilai sebagai sesuatu yang membosankan.

Hamka (2002) menyebutkan bahwa indikator persepsi terdiri atas:

- 1) Penyerapan, yaitu rangsangan yang berasal dari luar diserap oleh indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Di sini terjadi proses analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman-pengalaman individu yang telah ada sebelumnya. Hal ini menjadikan penyerapan bersifat individual, berbeda antara yang satu dengan yang lain walaupun rangsangan yang diserap tidak berbeda.

2) Pemahaman, yaitu sebagai hasil dari proses pengklasifikasian informasi.

Pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda pada setiap orang.

Mengenai Masyarakat menurut Hasan Sadhily (1984), masyarakat adalah sekelompok manusia baik dalam jumlah yang besar atau kecil yang mempunyai ikatan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam masyarakat terdapat ikatan batin yang menjadi unsur dalam masyarakat itu sendiri dan yang penting di dalam masyarakat adalah adanya ikatan diantara warganya.

Menurut Koenjaraningrat (1994), masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang saling interaksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan dan diikat oleh suatu identitas bersama. Berikut ini definisi masyarakat menurut Selo Soemardjan (Soekanto, 2009), yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama, dan menghasilkan kebudayaan.

Unsur-unsur masyarakat menurut Soekanto (2009) yaitu:

- a. Manusia yang hidup secara bersamaan
- b. Berkumpul dalam jangka waktu yang lama
- c. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu sama lain
- d. Adanya kesadaran bahwa mereka ialah suatu sistem untuk hidup bersamaan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat merupakan suatu pandangan yang dilihat oleh masyarakat dalam memahami dan memberikan tanggapan mengenai peristiwa atau objek-objek tertentu.

Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. Pelaku persepsi, hal ini terjadi apabila seorang individu melihat suatu objek dan berusaha menginterpretasikan apa yang sudah dilihatnya, di mana hasil interpretasi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi yang bersangkutan.
2. Target, karakteristik dari target yang dilihat dapat mempengaruhi hasil persepsi seseorang. Seseorang cenderung membagi benda-benda yang mempunyai kemiripan dalam satu kelompok.
3. Situasi. Situasi harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi persepsi seseorang dalam melihat suatu objek atau peristiwa.

1.6.2 Akuntabilitas

Menurut The Advance Learner's Dictionary (Lembaga Administrasi Negara, 2000: 21), akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Artinya, akuntabilitas mengandung makna keharusan untuk memberikan laporan mengenai semua aktivitas khususnya tentang administrasi keuangan kepada pihak yang mempunyai kekuasaan di atasnya.

Mardiasmo (2009: 21) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah Perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Lebih lanjut Mardiasmo(2009:21) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, merupakan bentuk tanggungjawab dalam mengelola dana yang diberikan kepada pihak di atasnya.

2. Akuntabilitas horisontal, merupakan bentuk tanggungjawab yang diberikan kepada publik.

Akuntabilitas harus dilaksanakan dengan media yang bisa dikomunikasikan kepada pihak-pihak internal maupun pihak-pihak eksternal (publik). Akuntabilitas juga dilakukan dalam waktu yang teratur baik sesuai dengan perencanaan sebagai bentuk kewajiban hukum serta bukan karena kesukarelaan. Tipe akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, digunakan dalam semua tingkatan pada organisasi internal penyelenggaraan negara, dimana semua pegawai publik baik perorangan maupun secara berkelompok memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pimpinan secara langsung tentang perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaannya secara teratur.
2. Akuntabilitas Eksternal, digunakan disemua lembaga negara sebagai suatu institusi untuk mempertanggungjawabkan semua kepercayaan yang diterimanya dan sudah melaksanakan untuk diinformasikan pada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas adalah sebuah kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab seluruh bagian perusahaan, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif (Kaihatu, 2006). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau seseorang dimana nantinya akan ada keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menyebutkan ada empat dimensi akuntabilitas yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi dalam sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran yaitu terkait dengan adanya penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya ketaatan terhadap suatu hukum serta peraturan lainnya yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan adanya apakah yang dilakukan dalam mengerjakan tugas telah cukup baik dalam hal pemberian sistem informasi manajemen, prosedur administrasi dan sistem informasi akuntansi.
3. Akuntabilitas program yaitu terkait dengan adanya suatu pertimbangan apakah tujuan yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, serta apakah sudah mempersiapkan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan adanya pertanggungjawaban aparat pemerintah, baik dari pusat maupun dari daerah, terhadap kebijakan-kebijakan yang disepakati oleh pemerintah kepada DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Salah satu tuntutan masyarakat adalah melakukan tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini dapat dilihat melalui akuntabilitas. Menurut (Miriam, 2012), mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pihak yang menerima kepercayaan untuk memberikan perintah pada pihak yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Akuntabilitas berartibentuk tanggungjawab dengan membuat

monitoring dengan cara mendistribusikan kekuasaan pada setiap lembaga pemerintah sehingga meminimalkan terpusatnya kekuasaan serta menciptakan situasi yang saling berkaitan.

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan akuntabilitas sebagai sesuatu yang harus dilakukan seorang individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa yang dikelola dan mengendalikan sumber daya dan melaksanakan program-program yang dimandatkan kepadanya untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan dengan cara bertanggung jawab secara periodik.

Bila dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akuntabilitas didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan Pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan pemerintahan di desa dalam kerangka otonomi desa agar dapat meraih tujuan yang sudah ditentukan melalui alat yang sudah terukur dengan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa mempunyai tanggungjawab pada semua hal yang telah dilaksanakan dalam upaya melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa (Hari, 2007: 129).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemerintah desa untuk memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut.

1. Faktor-faktor Yang Mendukung Akuntabilitas

a. Kepemimpinan

Seorang pemimpin akan membutuhkan akuntabilitas yang dilaksanakan mulai dari tingkatan yang mendasar.

b. Sistem Informasi

Sistem informasi sangatlah membantu tumbuh kembangnya akuntabilitas yang diberikan kepada bawahannya ataupun masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat memberikan dampak positif.

c. Koordinasi

Koordinasi sangatlah diperlukan di setiap organisasi pemerintahan agar akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang. Koordinasi sangat mudah diucapkan namun sangatlah tidak mudah untuk dilakukan akibat *conflict of interest* diantara pihak yang berkoordinasi.

d. *Explicitness and clarity*

Evaluasi kinerja harus diungkapkan secara jelas dan nyata sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus dikuntabilitaskan.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia ialah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menunjang proses berjalan akuntabilitas dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan baik secara akuntabel, transparansi atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Negosiasi

Harus adanya negosiasi mengenai perbedaan sasaran, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab disetiap instansi pemerintah. Hal-hal yang harus dinegoisasikan antara lain adalah menentukan pihak yang harus memegang tanggung jawab terhadap aktivitas yang diemban.

Indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20-38, yaitu:

1. Perencanaan
 - a. Adanya perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholders
 - b. Adanya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
2. Pelaksanaan
 - a. Kepatuhan terhadap prosedur yang telah direncanakan
 - b. Semua pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
3. Penatausahaan
 - a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan
4. Pelaporan
 - a. Adanya pelaporan yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan
 - b. Adanya transparansi dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat
5. Pertanggungjawaban
 - a. Kesesuaian anggaran yang dilaksanakan dengan hasil perencanaan
 - b. Adanya kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan

1.6.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hasil yang diperoleh desa terutama pada bagian keuangannya dari kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diperoleh oleh Kabupaten

Sanusi dan Djumlani(2014: 78) mendefinisikan alokasi dana desa sebagai berikut: Dana yang wajib diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 menyebutkan bahwa: Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

a. Tujuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menurut kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, membuka kesempatan bekerja dan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berusaha
4. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam bergotong royong

b. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dua asas yaitu:

1. Asas Merata, menunjukkan bahwa bagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa sama, biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil, menunjukkan bahwa bagian Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa dibagi secara proporsional sesuai dengan nilai bobot Desa yang dihitung menurut rumus dan variable tertentu, dikenal juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengelolaannya tidak bisa dipisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Maka dari itu, dalam pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua aktivitas yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Mempertanggungjawabkan semua aktivitas secara administratif, teknis dan hukum
3. Prinsip hemat, terarah dan terkendali harus digunakan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Aktivitas yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada di masyarakat seperti memenuhi kebutuhan pokok, menguatkan keorganisasian desa serta aktivitas yang lain yang diperlukan oleh masyarakat dimana hal ini ditetapkan dengan cara musyawarah
5. Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta proses pencatatannya harus sesuai dengan prosedur yang ada.

1.7 Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan suatu pandangan yang dilihat oleh masyarakat dalam memahami dan memberikan tanggapan mengenai peristiwa atau objek-objek tertentu.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ialah sebagai sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang individu atau institusi sebagai wujud tanggungjawab

dalam mengelola keuangan desa dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan program-program yang diamanatkan kepadanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan dilakukan secara periodik.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara desa yang satu dengan yang lainnya dalam membiayai kebutuhan desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan serta melayani masyarakat.

1.8 Definisi Operasional

Berdasarkan indikator diatas tentang persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu meliputi:

1. Perencanaan
 - a. Adanya perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholders
 - b. Adanya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
2. Pelaksanaan
 - a. Kepatuhan terhadap prosedur yang telah direncanakan
 - b. Semua pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
3. Penatausahaan
 - a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan
4. Pelaporan
 - a. Adanya pelaporan yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan
 - b. Adanya transparansi dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat

5. Pertanggungjawaban

- a. Kesesuaian anggaran yang dilaksanakan dengan hasil perencanaan
- b. Adanya kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mixed methodology*). *Mixed method* memberikan hasil yang lebih lengkap dalam membahas permasalahan penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti ini mempunyai kebebasan dalam memakai semua alat pengumpul data menurut jenis data yang digunakan. *Mixed Method* merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, yaitu dalam proses pengumpulan data serta kajian model campuran menggabungkan dua pendekatan dalam setiap tahapan proses penelitian Abbas dalam Syaroh (2012).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu obyek berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2012), data kuantitatif dikumpulkan kemudian mengumpulkan data kualitatif untuk memperbanyak sumber informasi, Abbas dalam Syaroh (2012). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *mix methods* digunakan untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil analisis secara lebih lengkap.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan pada populasi atau sampel tertentu, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Penelitian campuran (*mixed methodology*) dalam penelitian ini ialah lebih mengutamakan penelitian dengan metode kuantitatif sedangkan metode penelitian kualitatif ialah sebagai faktor untuk mengutkan data-data yang didapat melalui metode kuantitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang akan dilaksanakan penelitian. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dilaksanakan di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo.

1.9.3 Unit Analisa Data

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu satuan berupa kelompok, individu, benda ataupun suatu latar peristiwa sosial seperti aktivis kelompok atau individu sebagai suatu subjek penelitian (Hamidi, 2005). Unit analisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Unit Analisis Penelitian

No	Nama Instansi	Jumlah
1	Pemerintah Desa	5
2	Ketua Pedekuhan 1-12	12
3	Masyarakat	98

1.9.4 Jenis Data

1.9.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang berasal dari kata-kata yang terucap secara lisan melalui wawancara. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden secara langsung (Arikunto, 2010). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Primer

No	Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
1	Sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 60 Tahun 2017	Pemerintah Desa di Desa Krembangan	Wawancara
2	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pemerintah Desa di Desa Krembangan	Wawancara
3	Proses berjalannya sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pemerintah Desa di Desa Krembangan	Wawancara
4	Terkait persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pemerintah Desa di Desa Krembangan dan Masyarakat	Wawancara

1.9.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data menunjang data primer. Data sekunder ini berasal dari studi keperpustakaan dari berbagai media seperti buku, artikel, jurnal, media massa, undang-undang, peraturan bupati, peraturan pemerintah, permendagri dan lain-lain (Arikunto, 2010). Adapun data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.4
Data Sekunder

No	Data	Sumber Data
1	APBDes Tahun 2017	Dokumentasi
2	Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017	Dokumentasi

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan yang penting dalam penelitian karena berhubungan dengan data yang tersedia dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga sampel yang digunakan adalah benar. Oleh karena itu metode pengumpulan data harus dilaksanakan secara tepat. Maka untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi:

1.9.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung. Wawancara adalah percakapan secara bertatap muka antara orang yang mewawancarai dengan terwawancara, dimana orang yang mewawancarai mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai suatu objek penelitian yang sudah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tak-terstruktur (*in-depth interview*) dan wawancara elit (*elite interviewing*). *Elite interviewing* merupakan metode wawancara kepada elit yang merupakan sebagai ahli/orang yang paham terkait topik yang diteliti. Dalam menggunakan metode ini harus memperhatikan 4 titik kunci yaitu: menentukan siapa yang ingin diwawancarai, mendapatkan akses dan mengatur wawancara, melakukan wawancara dan menganalisis hasil Burnham (dalam Sakir, 2015).

Tabel 1.5

Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	Samiran	Kepala Desa
2	Slamet Rusdiharjo, S,Pd	Sekretaris Desa
3	Sri Dalyati	Kaur Pendapatan dan Perencanaan
4	Ramelan	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
5	Ahmad Mubasyir, S,Pd.I	Kasi Kemasyarakatan

1.9.5.2 Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, dimana teknik ini digunakan melalui berbagai sumber seperti melalui dokumen-dokumen, buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah dan berita. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan mencari kebenaran secara ilmiah sebagai landasan untuk menganalisa data.

1.9.5.3 Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner bentuk tertutup. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian dari satu-satuan individu atau unit analisis yang dimana target populasi penelitian ini yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan (Arikunto, 2010). Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi penelitian ini adalah semua warga masyarakat Desa Krembangan yang berjumlah 4.931 orang terdiri 11 pedukuhan. Di setiap pedukuhan diperkirakan 8-9 orang sehingga diperoleh populasi penelitian sebanyak 98 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menyesuaikan diri berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu (Sumarni dan Salamah, 2009). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden merupakan warga Desa Krembangan
- b. Responden bisa baca dan tulis
- c. Warga bersedia menjadi responden

Menurut Arieandy (2012) apabila populasi lebih dari 100, maka sampel yang diambil 15% atau 20-25%. Adapun dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan perhitungan jumlah sampel, populasi dan batas toleransi kesalahan 10% (*error tolerance*). Perhitungan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

$$n = 4.931 / (1 + 4.931 \times 0,1^2)$$

$$n = 4.931 / (1 + 49,31)$$

$$n = 4.931 / 50,31$$

$$n = 98,01 \text{ dibulatkan menjadi } 98 \text{ orang}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan/*error tolerance* (10%)

Hasil dari perhitungan rumus slovin diatas sebanyak 98 responden/sampel. Dimana sampel yang digunakan harus *representatif*. Oleh karena itu, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan teknik sampling acak sederhana. Sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*) adalah metode paling dekat dengan definisi *Probability Sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua masyarakat desa.

Kuesioner ini ditujukan kepada semua masyarakat Desa Krembangan. Hal tersebut untuk mengetahui persepsi responden tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dikemukakan Sugiono (2014: 93) bahwa skala *Likert* digunakan “untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial”. Kriterianya sebagai berikut:

- a. Sangat Baik (SB)
- b. Baik (B)
- c. Kurang Baik (KB)
- d. Tidak Baik (TB)
- e. Sangat Tidak Baik (STB)

1.9.6 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, baik data primer ataupun data sekunder dilakukan sebuah analisa data. Teknik analisa data menurut Paton (2015) teknik

analisa data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini digunakan beberapa langkah-langkah analisis data yang meliputi:

a. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Analisis data kualitatif ini dimaksud untuk menjawab rumusan masalah mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1) Reduksi

Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Langkahnya ialah memetakan dan mensinkronkan jawaban narasumber dengan pertanyaan yang diajukan, misalnya pertanyaan yang bertujuan mendapatkan jawaban perihal motif akan dipilah jawaban yang sesuai sebagai bahan analisa. Bila jawaban tidak sesuai atau melenceng dari pertanyaan, maka jawaban tersebut disimpan sebagai perbandingan atau triangulasi data.

2) Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penulis berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Pengkodean berisi informasi-informasi, baik dari sumber primer dan sekunder, yang memiliki hubungan dengan latar, topik dan subjek penelitian. Langkah ini kemudian dilakukan dengan cara mencocokkan teori yang dipakai dan temuan data di lapangan. Pengkodean atau pengelompokan ini dilakukan untuk memilah jawaban yang sama atau hampir sama antar satu narasumber dan narasumber yang lain dalam kesatuan pertanyaan yang sama. Dalam penyajian data, data (hasil wawancara) dari narasumber dan dokumen lain dikelompokkan menjadi beberapa data sekunder dan primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah mensinkronkan data atau jawaban yang diberikan narasumber dan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian, kemudian data (baik tertulis atau tidak tertulis) dan jawaban narasumber disajikan sesuai dengan resume masalah dan teori yang dipakai.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data ditujukan untuk memperoleh makna dalam persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan ditarik dengan cara membandingkan antara pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terdapat dalam konsep-konsep dasar penelitian ini. Sedangkan verifikasi ditujukan agar evaluasi menjadi lebih tepat, komprehensif, dan objektif.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan.

b. Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh dari korelasi dan regresi. Analisis data kuantitatif ini dimaksud untuk menjawab rumusan masalah mengenai persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih.

Menurut Sugiono (2014:87) metode korelasi adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubungkan antara satu unsur/elemen dengan unsur/elemen lain untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Sedangkan menurut Jonathan (2006:37) Analisis korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Analisis korelasi juga digunakan analisis korelasi *product moment* yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dua variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai korelasi populasi (ρ) berkisar pada interval $-1 \leq \rho \leq 1$. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika korelasi berniali negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah. Jika terdapat hubungan, maka seberapa besar hubungan tersebut.

2. Regresi

Analisis Regresi meruoakan salah satu metode yang sangat terkenal untuk mencari hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Menurut Nazir (2014) analisis regresi bertujuan “ingin mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen”. Dalam analisis regresi, 4 usaha pokok akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris;

- b. Menguji berapa besar variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi variabel independen;
- c. Menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak; dan
- d. Melihat apakah tanda dan magnitud dari estimasi parameter cocok dengan teori.

Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan, dimana didalamnya terdapat variable independen dan variable dependen. Apabila terjadi suatu kenaikan dari satu variable, maka variable selanjutnya akan mengikuti atau tidak. Model regresi dalam penelitian ini adalah regresi sederhana yaitu hanya membutuhkan dua variable yaitu variable independen dan dependen. Dalam analisis regresi, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah berbentuk linear.